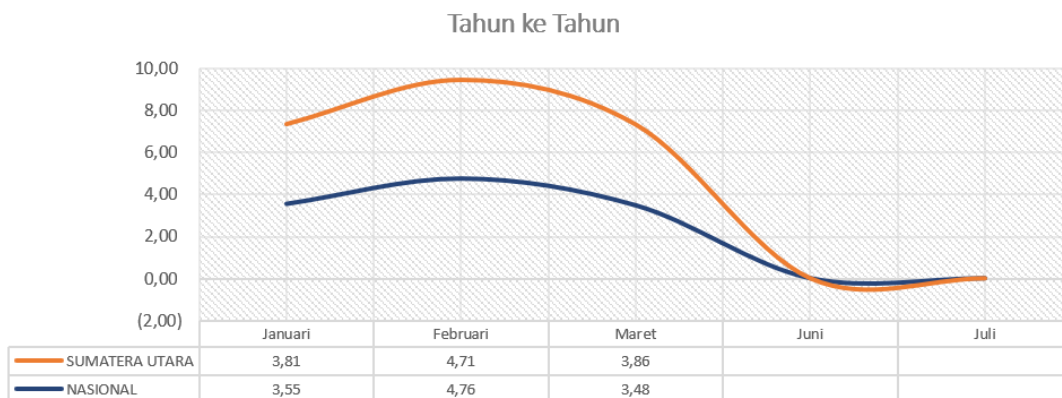
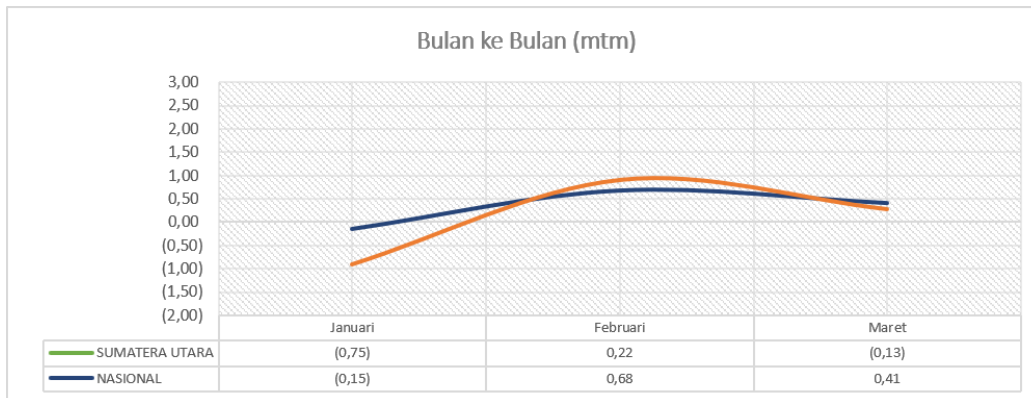


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

PERKEMBANGAN INFLASI PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN I

Perkembangan tingkat inflasi pada suatu daerah provinsi dapat dilihat dari Indeks Harga Konsumen (IHK). Provinsi Sumatera Utara memiliki 8 (delapan) daerah IHK yang dapat dijadikan acuan perkembangan tingkat inflasi, yaitu Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Padangsidimpuan, Gunungsitoli, Deli Serdang, Karo dan Labuhanbatu. Pada Triwulan-I seluruh daerah IHK di Provinsi Sumatera Utara pada bulan Januari 2026 tercatat inflasi (yoy) sebesar 3,81 persen, bulan Februari 2026 mengalami inflasi sebesar 4,71 persen dan bulan Maret 2026 mengalami inflasi sebesar 3,86 persen. Adapun perkembangan inflasi itu dapat dilihat data BPS Provinsi Sumatera Utara mulai Januari sampai dengan Maret 2026 yang antara lain:

NO	BULAN	INFLASI <i>Month to Month</i>	INFLASI TAHUN KALENDER	INFLASI <i>Year on Year</i>
1	JANUARI			
	SUMATERA UTARA	-0,75	-0,75	5,28
	NASIONAL	-0,15	-0,15	3,55
2	FEBRUARI			
	SUMATERA UTARA	0,22	-0,53	4,71
	NASIONAL	0,68	0,53	4,76
3	MARET			
	SUMATERA UTARA	-0,13	-0,66	3,86
	NASIONAL	0,41	0,94	3,48



- Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Januari 2026, antara lain: tarif listrik sebesar 1,13 persen; emas perhiasan sebesar 0,90 persen; beras sebesar 0,30 persen; ikan dencis sebesar 0,26 persen; daging ayam ras sebesar 0,20 persen; ikan tongkol/ikan ambu-ambu sebesar 0,18 persen; ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso sebesar 0,13 persen; akademi/ perguruan tinggi sebesar 0,11 persen; cabai rawit, Sigaret Kretek Tangan (SKT), dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) masing-masing sebesar 0,07 persen; kelapa sebesar 0,06 persen; kontrak rumah sebesar 0,05 persen; udang basah dan sawi putih/pecay/pitsai masing-masing sebesar 0,04 persen; brokoli, bawang merah, ayam goreng, mobil, dan jeruk masing-masing sebesar 0,03 persen. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: cabai merah sebesar 0,66 persen; bawang putih dan kentang masing-masing sebesar 0,09 persen; jengkol sebesar 0,04 persen; cabai hijau dan angkutan udara masing-masing sebesar 0,03 persen; daging babi, wortel, sabun detergen bubuk, dan ikan lele masing-masing sebesar 0,02 persen; pengharum cucian/pelembut, detergen cair, bensin, tomat, anggur, terong, telepon seluler, susu bubuk untuk balita, tembakau, dan pembasmi nyamuk spray masing-masing sebesar 0,01 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,82 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,32 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 8,42 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,94 persen; kelompok transportasi sebesar 0,74 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,78 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,75 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,31 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 16,40 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan

dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,21 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04 persen.

- Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Februari 2026, antara lain: tarif listrik sebesar 1,76 persen; emas perhiasan sebesar 0,98 persen; daging ayam ras sebesar 0,43 persen; beras sebesar 0,29 persen; ikan dencis sebesar 0,24 persen; ikan tongkol/ ikan ambu-ambu sebesar 0,17 persen; tomat sebesar 0,12 persen; akademi/perguruan tinggi sebesar 0,11 persen; ikan kembung/ikan gembung/ ikan banyar/ikan gembolo/ ikan asoaso sebesar 0,10 persen; udang basah sebesar 0,08 persen; Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) masing-masing sebesar 0,07 persen; kelapa sebesar 0,06 persen; kontrak rumah sebesar 0,05 persen; telur ayam ras dan jeruk masing-masing sebesar 0,04 persen; serta minyak goreng, kol putih/kubis, ayam goreng, dan mobil masing-masing sebesar 0,03 persen. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: cabai merah sebesar 0,35 persen; cabai rawit sebesar 0,19 persen; kentang sebesar 0,15 persen; bawang putih sebesar 0,11 persen; wortel sebesar 0,07 persen; bensin sebesar 0,05 persen; cabai hijau sebesar 0,04 persen; jengkol, daging babi, dan terong masing-masing sebesar 0,03 persen; sabun detergen bubuk sebesar 0,02 persen; serta kemeja panjang katun pria, popok bayi sekali pakai/ diapers, bawang merah, gula pasir, susu bubuk untuk balita, detergen cair, pir, tembakau, dan pembersih lantai masing-masing sebesar 0,01persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,42 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,26 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 13,28 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,48 persen; kelompok transportasi sebesar 0,55 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,73 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,71 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,38 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 16,94 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,18 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen.
- Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Maret 2026, antara lain: tarif listrik sebesar 0,90 persen; emas perhiasan sebesar 0,85 persen; daging ayam ras sebesar 0,36 persen; beras sebesar 0,28 persen; ikan dencis sebesar 0,21 persen; ikan tongkol/ ikan ambu-ambu sebesar 0,13 persen; ikan kembung/ikan gembung/ ikan banyar/ikan gembolo/ ikan aso-aso sebesar 0,12 persen; udang basah dan akademi/perguruan tinggi masing-masing sebesar 0,11 persen; angkutan udara sebesar 0,10 persen; telur ayam ras sebesar 0,08 persen; Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 0,07 persen; Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan jeruk masing-masing sebesar 0,06 persen; minyak goreng, kangkung, dan kontrak rumah masing-masing sebesar 0,05 persen; kol putih/kubis dan mobil masing-masing sebesar 0,04 persen; dan tomat sebesar 0,03 persen. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: cabai merah sebesar 0,31 persen; kentang sebesar 0,18 persen; bawang putih sebesar 0,14 persen; cabai rawit sebesar 0,11 persen; bawang merah sebesar 0,09 persen; cabai hijau sebesar 0,06 persen; wortel dan daging babi masingmasing sebesar 0,03 persen; bensin, detergen cair, dan sabun detergen bubuk masing-masing sebesar 0,02 persen; serta terong, kemeja panjang katun pria, popok bayi sekali

pakai/diapers, pembersih lantai, pengharum cucian/pelembut, sabun mandi cair, jengkol, tembakau, dan Air Conditioner (AC) masing-masing sebesar 0,01 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,50 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,53 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 6,73 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,54 persen; kelompok transportasi sebesar 1,54 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,50 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,75 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,71 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,37 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 14,77 persen. Sedangkan satu indeks kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,23 persen.

2. Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya. Dari hasil monitoring dan survey beberapa komoditas bahan pokok di 33 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara sejak bulan Januari s.d Maret 2026, diperoleh data sebagai berikut:

3. Tabel Harga Rata-Rata Bahan Pokok di Provinsi Sumatera Utara

KOMODITI	Januari	FEBRUARI	MARET
Beras Medium	Rp14.225/kg	Rp14.319/kg	Rp14.451/kg
Jagung Pipilan	Rp7.199/kg	Rp7.532/kg	Rp8.101/kg
Bawang Merah	Rp40.422/kg	Rp36.558/kg	Rp34.589/kg
Bawang Putih	Rp36.444/kg	Rp35.196/kg	Rp34.262/kg
Cabai Merah Keriting	Rp30.048/kg	Rp36.443/kg	Rp28.678/kg
Cabai Rawit Hijau	Rp61.046/kg	Rp37.081/kg	Rp28.426/kg
Daging Sapi Murni	Rp130.488/kg	Rp134.414/kg	Rp132.739/kg
Daging Ayam Broiler	Rp38.038/kg	Rp40.556/kg	Rp40.589/kg
Telur Ayam Ras	Rp30.250/kg	Rp29.368/kg	Rp29.787/kg
Gula Pasir	Rp18.070/kg	Rp18.053/kg	Rp18.590/kg
Minyak Goreng Curah	Rp18.060/Ltr	Rp18.150/Ltr	Rp18.410/Ltr
Minyak Goreng Premium	Rp21.755/Ltr	Rp21.753/Ltr	Rp21.695/Ltr
Minyakita	Rp16.911/Ltr	Rp16.237/Ltr	Rp16.330/Ltr
Ikan Kembung	Rp47.219/kg	Rp42.844/kg	Rp42.662/kg
Tempe	Rp16.638/kg	Rp16.936/kg	Rp16.676/kg
Tepung Terigu Protein Sedang	Rp13.106/kg	Rp13.420/kg	Rp13.130/kg
Indomie Kari Ayam	Rp3.251/kg	Rp3.568/kg	Rp3.300/kg
Udang Laut Segar	Rp86.819/kg	Rp88.306/kg	Rp91.199/kg
Tahu Mentah	Rp11.569/kg	Rp11.284/kg	Rp10.952/kg
Pisang Barangan	Rp11.349/kg	Rp11.733/kg	Rp11.654/kg
Jeruk Manis	Rp16.366/kg	Rp16.233/kg	Rp16.549/kg
Susu Bubuk Balita	Rp44.102/ktk	Rp46.872/ktk	Rp46.000/ktk

Data harga pangan Januari-Maret 2026 menunjukkan tren beragam: beras medium dan jagung terus naik sehingga berpotensi menekan daya beli, sementara bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, dan cabai rawit hijau mengalami penurunan signifikan pasca lonjakan Februari. Daging sapi relatif stabil di kisaran Rp130-134 ribu/kg, sedangkan ayam broiler dan telur ayam ras sedikit fluktuatif namun tetap di atas HAP. Komoditas strategis lain seperti gula pasir dan minyak goreng curah cenderung naik, berbeda dengan minyak goreng premium dan Minyakita yang relatif stabil. Ikan kembung, tahu, dan tempe menunjukkan penurunan harga, sedangkan udang laut segar terus meningkat. Secara keseluruhan, pola ini mencerminkan tekanan inflasi dari beras, jagung, dan protein hewani, sementara hortikultura dan sebagian pangan olahan menjadi faktor penahan harga.

1. RESIKO KEDEPAN

- Ketersediaan komoditas pangan strategis seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging dan telur ayam ras, serta minyakita berpotensi menimbulkan tekanan inflasi apabila pasokan tidak terjaga.
- Sentimen pasar pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 2026 diperkirakan mendorong kenaikan harga pada beberapa komoditas utama, khususnya beras, cabai merah, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, daging sapi, daging dan telur ayam ras, serta minyakita.
- Perlu pengawasan intensif terhadap harga minyak goreng curah/minyakita agar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), mengingat potensi lonjakan harga dapat memicu inflasi dan mengganggu stabilitas.
- Perlu perhatian terhadap perkembangan harga dan ketersediaan gula pasir agar sesuai dengan Harga Acuan Penjualan (HAP), karena penyimpangan harga dapat menimbulkan tekanan inflasi.
- Panen padi yang tidak merata pada awal tahun berpotensi mempengaruhi ketersediaan beras dan mendorong kenaikan harga.
- Antisipasi terhadap bencana hidrometeorologi tetap diperlukan karena dapat mengganggu produksi pertanian dan pasokan bahan pangan pokok.
- Setelah HBKN Idul Fitri, pola konsumsi masyarakat cenderung menurun, namun risiko inflasi tetap ada pada komoditas beras, cabai, dan bawang akibat distribusi pasca-panen yang tidak merata.
- Periode transisi musim tanam dan panen padi di beberapa daerah dapat menimbulkan fluktuasi harga beras, sehingga perlu langkah stabilisasi melalui operasi pasar dan penguatan cadangan beras pemerintah.
- Potensi kenaikan harga gula pasir dan minyak goreng masih perlu diantisipasi, terutama menjelang momentum HBKN berikutnya (Idul Adha) yang biasanya meningkatkan permintaan daging sapi dan ayam ras.
- Perlu koordinasi lintas OPD dan instansi terkait dalam menjaga kelancaran distribusi pangan, khususnya di wilayah rawan bencana hidrometeorologi yang dapat menghambat pasokan.
- TPID Provinsi Sumatera Utara perlu menyiapkan strategi pengendalian inflasi berbasis kewilayahan, termasuk memperkuat kerja sama dengan kabupaten/kota untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas utama.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI DI SUMATERA UTARA

1. Komoditas penyumbang inflasi utama: beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, serta komoditas non-pangan seperti emas perhiasan, tarif listrik, dan tarif parkir. Inflasi tahunan mencapai 3,86%, dengan tekanan tertinggi di Kota Gunungsitoli (6,30%) dan terendah di Kabupaten Karo (3,01%).
2. Keterbatasan fasilitas penyimpanan: BUMD Sumut belum memiliki Cold Atmosphere Storage (CAS) untuk hortikultura, sehingga pasokan cabai, bawang, dan tomat tidak terjaga stabil dan berkontribusi pada fluktuasi harga.
3. Tantangan struktural pengendalian inflasi:
 - Inefisiensi struktur pasar pangan: rantai pasok panjang, biaya distribusi tinggi, dan dominasi pedagang besar.
 - Produksi pangan tidak merata: pola tanam belum terkelola baik, kapasitas produksi terbatas, serta daya tawar petani rendah.
 - Infrastruktur distribusi terbatas: akses jalan dan sarana transportasi di beberapa daerah masih terkendala, terutama wilayah sentra produksi.
 - Kesenjangan informasi: akses data harga dan pasokan pangan belum merata, sehingga koordinasi antarwilayah kurang optimal.
 - Kapasitas produksi terbatas: teknologi budidaya dan manajemen pola tanam belum maksimal, serta tata ruang pertanian belum mendukung stabilitas pasokan.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI SUMATERA UTARA

1. Monitoring harga bahan pangan pokok bersama Satgas Pangan Polda Sumatera Utara ke Pasar Sambu, Pusat Pasar, Pasar Sukaramai dan Pasar Simpang Limun Medan (14 Januari 2026).
2. *Groundbreaking* dalam rangka percepatan pemulihan sektor pertanian akibat bencana alam di wilayah pulau Sumatera di Kabupaten Tapanuli Tengah (15 Januari 2026).
3. *Capacity Building* dalam rangka penyusunan program unggulan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Utara (4 Maret 2026).
4. *High Level Meeting (HLM)* TPID Provinsi Sumatera Utara dalam rangka menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas pangan strategis menjelang HBKN Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2026, sekaligus peluncuran Roadmap Tim Pengendalian Inflasi Daerah Sumatera Utara 2025-2026 (6 Februari 2026).
5. Pasar Murah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Bahan Pokok menjelang HBKN Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah (10 Februari 2026).
6. Monitoring harga bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026 di Pasar Simpang Limun Medan (13 Februari 2026).
7. Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka stabilisasi harga bahan pangan menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2026 (13 Februari 2026).
8. Audiensi Pembentukan Toko Pantau Inflasi dengan Kabupaten Deli Serdang (25 Februari 2026).
9. Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan pada bulan ramadhan 1447 hijriah (27 februari 2026).

Rapat Kesepakatan Bersama Pengendalian Inflasi, Dukungan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pembentukan/Penguatan Toko Pantau Inflasi (4 Maret 2026).

11. Pasar murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga bahan pangan pokok pada bulan ramadhan 1447 H (6 maret 2026).
12. Monitoring Ketersediaan Pasokan dan Keterjangkauan Harga serta Stok Bahan Pokok dan Penting menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di beberapa Pasar Tradisional Kota Medan (13 Maret 2026).
13. Pelepasan Keberangkatan Peserta Mudik Gratis Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah Moda Angkutan Kereta Api (16 Maret 2026).
14. Monitoring harga bahan pangan pokok strategis dan bahan penting lainnya di Pasar Sukaramai menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah oleh Gubernur Sumatera Utara (17 Maret 2026).
15. Monitoring harga bahan pangan pokok strategis dan bahan penting lainnya di Pusat Pasar Kota Medan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprovsu (17 Maret 2026).
16. Rapat Rencana Kerja Sama dan Pembahasan Draft Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan 8 Kab/Kota IHK dan Kepulauan Nias (27 Maret 2026).
17. Rapat Verifikasi antara kebutuhan dan ketersediaan Bapokting dalam neraca pangan Provinsi Sumatera Utara (30 Maret 2026).

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

EVALUASI KEBIJAKAN

1. Monitoring harga bahan pangan pokok yang dilakukan secara intensif bersama Satgas Pangan, Gubernur, dan jajaran Pemprov di berbagai pasar tradisional terbukti meningkatkan transparansi harga dan memperkuat pengawasan distribusi. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui integrasi data harga antar daerah dan publikasi berkala untuk menjaga ekspektasi masyarakat.
 2. Program Gelar Pangan Murah (GPM) dan Pasar Murah menjelang HBKN Ramadan dan Idul Fitri berhasil menekan gejolak harga komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, dan minyak goreng. Evaluasi menunjukkan perlunya memperluas cakupan wilayah dan memperkuat koordinasi dengan kabupaten/kota agar dampaknya lebih merata.
 3. High Level Meeting (HLM) TPID dan peluncuran Roadmap TPID 2025-2026 menjadi langkah strategis dalam memperkuat arah kebijakan pengendalian inflasi. Namun, implementasi roadmap perlu dikawal dengan indikator kinerja yang jelas agar tidak hanya bersifat seremonial.
 4. Capacity Building TPID se-Sumatera Utara telah meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menyusun program unggulan. Evaluasi menunjukkan perlunya tindak lanjut berupa program aksi nyata di daerah, khususnya dalam penguatan produksi dan distribusi pangan.
 5. Groundbreaking pemulihan sektor pertanian di Tapanuli Tengah merupakan langkah penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pasca bencana. Namun, efektivitasnya bergantung pada percepatan pembangunan infrastruktur pertanian dan dukungan pembiayaan bagi petani.
 6. Pembentukan Toko Pantau Inflasi di Deli Serdang serta rencana penguatan kelembagaan di kabupaten/kota lain menjadi inovasi yang relevan. Evaluasi menunjukkan perlunya standarisasi model bisnis dan integrasi dengan sistem informasi harga nasional.
- 10.

Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan 8 kabupaten/kota dan Kepulauan Nias menunjukkan komitmen memperkuat distribusi pangan lintas wilayah. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada optimalisasi infrastruktur logistik dan digitalisasi rantai pasok.

8. Program sosial seperti Mudik Gratis Idul Fitri turut mendukung daya beli masyarakat dengan mengurangi beban pengeluaran transportasi. Evaluasi menunjukkan perlunya sinergi dengan program perlindungan sosial lain agar dampaknya lebih komprehensif terhadap stabilitas inflasi.
 - Rapat verifikasi neraca pangan menjadi instrumen penting dalam memastikan keseimbangan supply-demand. Evaluasi menunjukkan perlunya peningkatan kualitas data produksi, distribusi, dan konsumsi agar proyeksi inflasi lebih akurat.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

1. Memperkuat monitoring harga dan pasokan bahan pangan pokok secara berkala di pasar tradisional, sentra produksi, dan jalur distribusi.
2. Melanjutkan serta memperluas pelaksanaan Gelar Pangan Murah (GPM) dan Pasar Murah di seluruh kabupaten/kota.
3. Mengawal implementasi Roadmap TPID 2025–2026 dengan indikator capaian yang terukur dan program aksi nyata.
4. Memperluas pembentukan Toko Pantau Inflasi di kabupaten/kota dengan model bisnis yang terstandar dan terintegrasi.
5. Mengoptimalkan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk memperkuat distribusi pangan lintas wilayah.
6. Mendorong efisiensi produksi dan hilirisasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi, pembangunan Cold Storage/CAS, serta pengembangan produk olahan.
7. Memperluas Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) ke komoditas strategis selain beras dan melaksanakan kebijakan impor yang terukur.
8. Melanjutkan program sosial seperti Mudik Gratis dan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menjaga daya beli masyarakat.
9. Meningkatkan kualitas data produksi, distribusi, dan konsumsi serta melakukan publikasi harga secara berkala.
10. Memperkuat sinkronisasi program kerja pusat dan daerah serta menjaga komunikasi publik yang intensif untuk mengendalikan ekspektasi inflasi masyarakat.